



Pedagang Pasar Kembang Melawan Wali Kota

JOGJA - Penghuni kios Pasar Kembang sisi selatan Stasiun Tugu menuntut kejelasan lagi. Kali ini fokusnya pada uji materi Peraturan Wali Kota (Perwali) Jogja Nomor 51 Tahun 2017. Harapannya, ada kajian ulang tentang aturan yang telah mengubah Perwali Nomor 13 Tahun 2010.

"Dalam perwali yang lama jelas kalau lokasi itu statusnya pasar tradisional kelas IV. Kali ini kami ingin ada uji materi tentang perwali yang baru. Menurut kami, aneh dan menyimpang," ungkap Ketua Paguyuban Manunggal Karso Rudi Tri Purnama saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jogja kemarin (25/4).

Dia meyakini bahwa perwali tersebut menyalahi aturan dan menabrak prosedur. Terlebih, tidak ada kejelasan atas kompensasi. Tali asih atas pengusuran, lanjut dia, justru salah sasaran. Rudi menilai penerima kompensasi adalah pedagang liar. Selain tidak masuk paguyuban, mereka tidak berjualan di kios.

Rudi menjamin 83 pedagang Pasar Kembang terdaftar dalam Disperindag Kota Jogja. Terbukti, mereka rutin membayar retribusi resmi. Berbanding terbalik dengan pedagang liar.

"Saya dulu bayar retribusi sampai Rp 500 ribu per bulan. Lalu, punya kartu bukti pedagang, dulu dikeluarkan dinas pasar, sekarang jadi disperindag. Ada yang masih berlaku sampai 2020," ujar pemilik kios jamu itu.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tidak mempermasalahkan keinginan pemilik kios Pasar Kembang. "Saya malah belum tahu kalau ada laporan. Tidak apa-apa, itu *kam* hak mereka," kata Haryadi saat ditemui setelah meninjau pelaksanaan UNBK di SMPN 9 Jogja. (dwi/c10/sep)



DINA AGUS/JAWA POS RADAR JOGJA

UPAYA HUKUM: Paguyuban Manunggal Karso setelah mendaftarkan uji materi Perwali Nomor 51 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Jogja kemarin (25/4).

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005